


 **KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL** 

**HASIL PEMBAHASAN  
PRA MUSRENBANGNAS TAHUN 2015**

**AGENDA 5: MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA  
KESEHATAN**


Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

Jakarta, 28 April 2015


 **OUTLINE PAPARAN** 

1. Arah kebijakan Tahun 2016
2. Sasaran Pokok Pembangunan Kesehatan 2016
3. Isu Strategis
4. Sasaran Nawa Cita dan K/L Yang Berkontribusi
5. Hasil Pembahasan Kelompok Kesehatan
6. Permasalahan dalam Pembahasan
7. Kesimpulan dan tindak lanjut

2



## Arah Kebijakan Tahun 2016




### Kesehatan

1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas
2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat
3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
4. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan


### Kependudukan dan KB

5. Menguatkan advokasi dan KIE tentang program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK)
6. Menguatkan akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas
7. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan keluarga
8. Meningkatkan pembinaan kesehatan reproduksi remaja
9. Menguatkan kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana

3




## SASARAN POKOK PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2016




NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	SASARAN 2016
<b>1. SASARAN MAKRO</b>			
<b>Pembangunan Manusia dan Masyarakat</b>			
d.	Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	51,8% (Okt, 2014)	68
<b>KESEHATAN</b>			
<b>1</b>	<b>Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat</b>		
a.	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup diukur dengan proksi indikator, antara lain:	346 (SP 2010)	*)
	- Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	70,4 (2013)	77
	- Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4)	70,4 (2013)	74
b.	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup diukur dengan proksi indikator, antara lain:	32 (2012/2013)	*)
	- Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)	71,3 (2013)	78
	- Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	90 (2014)	91,5
c.	Prevalensi kekurangan gizi ( <i>underweight</i> ) pada anak balita (persen)	19,6 (2013)	18,3
d.	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen)	32,9 (2013)	30,5

\*)Data AKI dan AKB diperoleh melalui survey skala besar dan tidak tersedia setiap tahun


4




**Sasaran Pokok (2)**  


NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	SASARAN 2016
<b>2.</b>	<b>Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular</b>		
a.	Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk (persen)	297 (2013)	271
b.	Prevalensi HIV (persen)	0,46 (2014)	<0,5
c.	Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	25,8 (2013)	24,6
d.	Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)	15,4 (2013)	15,4
e.	Prevalensi merokok penduduk usia ≤18 tahun	7,2 (2013)	6,4
<b>3.</b>	<b>Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan</b>		
a.	Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	0 (2014)	700
b.	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	71,2 (2013)	80
c.	Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	1.015 (2013)	2.000


5




**Sasaran Pembangunan Kesehatan Lainnya**  


No	Indikator	Target RPJMN 2015-2019	Target 2016
<b>Kesehatan</b>			
a	Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)	107,2	99,6
b	Persentase Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran kesehatan lebih dari 10 persen dari APBD	-	55
c	Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	18,2	22,7
d	Prevalensi gizi buruk pada balita (persen)	-	5,2%
e	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria	300	245
f	Jumlah Puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinas Kesehatan dengan UTD dan RS	5.600	1.600
g	Jumlah Puskesmas non rawat inap dan Puskesmas rawat inap yang memberikan pelayanan sesuai standar	6.000	1.400
h	Persentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang	60	35
i	Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional yang menerapkan integrasi data rekam medis	60	15
j	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	84	81
<b>Kependudukan dan KB</b>			
k	Persentase rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,19	1,27
l	Angka kelahiran total (TFR) per perempuan usia reproduksi	2,3	2,36
m	Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara ( <i>all method</i> ) (persen)	66,0	65,4

6




## Isu Strategis 2016




1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan (*pembangunan dan rehabilitasi puskesmas, peningkatan puskesmas rawat inap, puskesmas keliling, ambulans, IPAL, pembangunan rumah dinas dokter, penguatan RS Regional, pembangunan RS pratama, pengadaan peralatan kesehatan*)
2. Penambahan jumlah peserta penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional
3. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
4. Perbaikan gizi ibu hamil, bayi dan balita (*penanggulangan kekurangan gizi, pengadaan PMT*)
5. Pencegahan penyakit menular dan penyakit tidak menular
6. Pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan (*dokter dan dokter spesialis, termasuk pelatihan tenaga kesehatan*)
7. Peningkatan kapasitas UKBM (*pembangunan dan pengadaan peralatan untuk Poskesdes, Posyandu, Polindes*)
8. Pengendalian kuantitas penduduk (*Advokasi dan KIE, Pelayanan KB, Pembinaan Remaja, dan Pembangunan Keluarga*)
9. Penguatan kelembagaan, landasan hukum dan penyerasian kebijakan, serta penguatan data dan informasi KKB
10. Pembangunan sarana air minum dan jaringannya serta sarana sanitasi

7

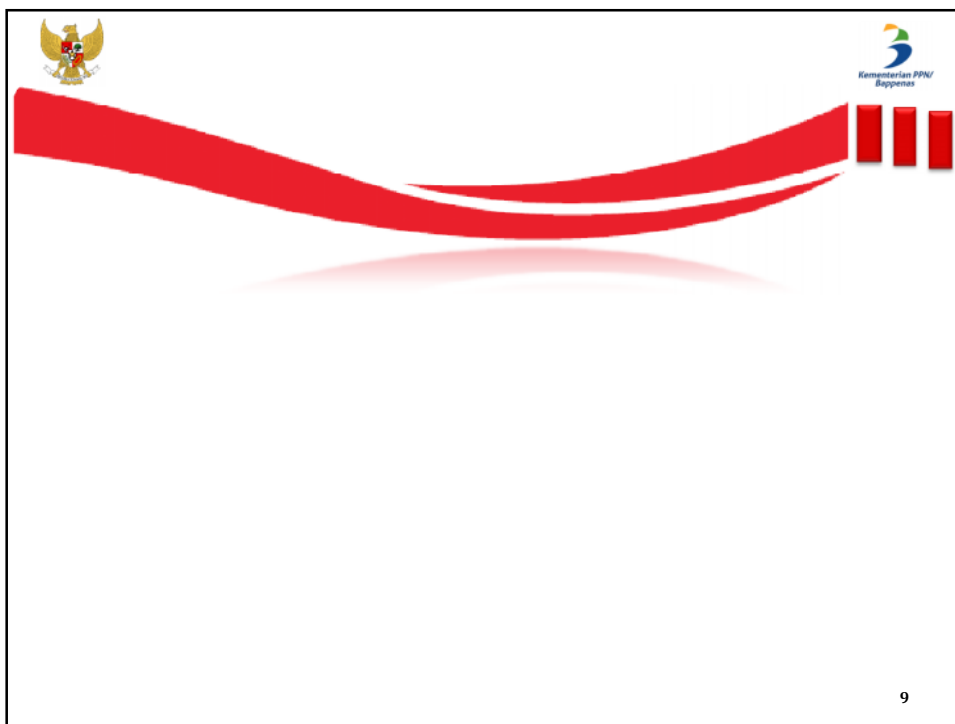


## Sasaran Nawa Cita dan K/L yang Berkontribusi




No.	Sasaran Nawa Cita	K/L Berkontribusi
1.	Inisiasi "Kartu Indonesia Sehat"	1. Kementerian Kesehatan 2. Kementerian Sosial 3. BKKBN 4. Badan POM
2.	Pengembangan 6000 puskesmas dengan fasilitas rawat inap	1. Kementerian Kesehatan
3.	Penambahan iuran BPJS kesehatan yang berasal dari APBN dan APBD perlu dilakukan	1. Kementerian Kesehatan 2. Kementerian Keuangan 3. Kementerian Sosial
4.	Mengalokasikan anggaran Negara sekurang-kurangnya 5% dari anggaran Negara untuk penurunan AKI, Angka Kematian Bayi dan Balita, pengendalian HIV dan AIDS, Penyakit menular dan penyakit kronis	1. Kementerian Kesehatan 2. BKKBN 3. Badan POM
5.	Meletakkan Dasar-Dasar bagi Dimulainya Desentralisasi Asimetris untuk Melindungi Kepentingan Nasional Indonesia di Kawasan-Kawasan Perbatasan, Memperkuat Daya Saing Ekonomi Indonesia secara Global dan untuk Membantu Daerah-Daerah yang Kapasitas Berpemerintahan Belum Cukup Memadai dalam Memberikan Pelayanan Publik	1. Kementerian Kesehatan 2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
6.	Tersedianya air bersih	1. Kementerian PU dan Pera 2. Kementerian Kesehatan

8




	Jumlah Usulan	Persentase	Usulan Pendanaan (Rp Juta)
<b>A. Usulan Berdasarkan Aplikasi e-musrenbang</b>			
<b>Jumlah Usulan Daerah</b>	2.131		Rp. 111.987.510,61
<b>Usulan Dibahas</b>	1.503	71%	
- Disepakati Melalui Anggaran Baseline K/L	1.263	59%	
- Disepakati Sebagai Inisiatif Baru	37	2%	
- Belum ada Kesepakatan	56	3%	
- Ditolak/Tidak Disepakati	147	7%	
<b>Usulan tidak Dibahas</b>	628*)	29%	
<b>B. Usulan Selama Pembahasan</b>			
- Usulan Tambahan	56		
<b>TOTAL USULAN</b>	<b>2.187</b>		

\*) Usulan yang tidak dibahas antara lain karena: (1) waktu pembahasan tidak mencukupi (termasuk karena kendala teknis aplikasi e-musrenbang); (2) usulan K/L lain yang tidak terkonfirmasi.




## Hasil Pembahasan (2)




---

- Rekapitulasi Hasil Pembahasan Bidang Kesehatan Berdasarkan K/L
  - Kementerian Kesehatan: 1.752 usulan
  - Badan POM: 10 usulan
  - BKKBN: 180 usulan
  - Kemen PU dan Pera: 189 usulan

11



## Hasil Pembahasan (3)




---


**Khusus untuk Kependudukan dan KB**

Keterangan	Kegiatan	
	Jumlah	
(1)	(2)	(3)
<b>Jumlah Prov-Kab/kota, Kegiatan dan Anggaran Usulan Daerah</b>	20 provinsi 45 Kab/Kota 180 Kegiatan	Rp 97.357,8 juta
<b>1. Disepakati</b>	169 Keg	94% (dari 180 keg)
- Melalui DAK KB	45 kab/kota	Sebagian besar usulan terkait KB berupa sarana dan prasarana ditampung dalam DAK KB
- Melalui Baseline KL (BKKBN Pusat) Alokon	9 provinsi	Pengadaan alokon
- Melalui Baseline KL (BKKBN Prov) Keg lainnya	9 provinsi	Kegiatan KB lainnya
<b>2. Disepakati dengan catatan pertimbangan</b>	1 keg di Sambas Kalbar: pelayanan KB terapung/trasportasi sungai (efektivitas dan jaminan Operasional dan Pemeliharaan)	
<b>3. Ditolak</b>	11 keg 4 provinsi atau 11 kab/kota, yaitu pengadaan kendaraan dinas kantor, alat2 studio, dan pembangunan kantor SKPD	

12



## Hasil Pembahasan (4)




---

### Hasil Pembahasan Secara Umum


➤ Dari total 2.131 usulan daerah di Kelompok Pembahasan Kesehatan, 1.263 usulan (59%) dapat diakomodir. Usulan tersebut terbagi atas:

- Usulan terkait kegiatan operasional yang pasti akan dipenuhi dari dana Dekonsentrasi K/L : 314 usulan
- Usulan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang telah diusulkan melalui e-planning dan bantuan operasional kesehatan akan dipenuhi dari dana Tugas Pembantuan (TP) K/L: 384 usulan
- Usulan yang terdapat dalam menu DAK kesehatan dan KB akan dipenuhi dari Dana Alokasi Khusus (DAK): 394 usulan
- Usulan yang akan didanai dari kegiatan APBN Pusat: 93 usulan
- Usulan yang diusulkan untuk diakomodasi dari dana Kemen PU dan Pera yang akan ditentukan pada Rakonreg: 78 usulan

13

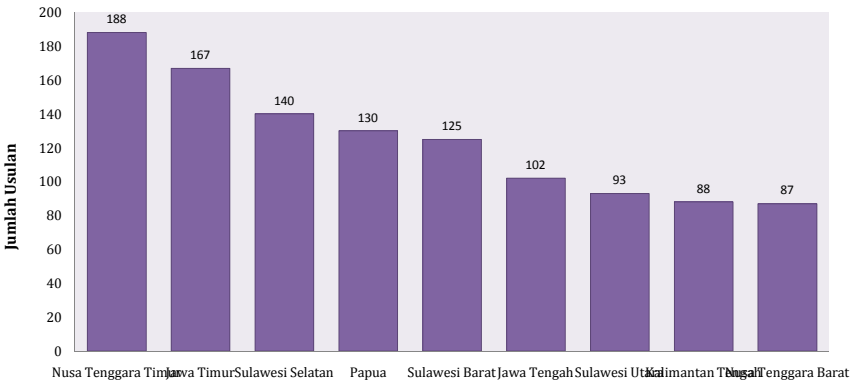


## Hasil Pembahasan (5)



---

- **10 Provinsi Yang Memberikan Usulan Kegiatan Paling Banyak**



Provinsi	Jumlah Usulan
Nusa Tenggara Timur	188
Jawa Timur	167
Sulawesi Selatan	140
Papua	130
Sulawesi Barat	125
Jawa Tengah	102
Sulawesi Utara	93
Kalimantan Tengah	88
Nusa Tenggara Barat	87

14

**Hasil Pembahasan (6)**

• **10 Provinsi Yang Usulan Kejadiannya Paling Banyak Disepakati**

Provinsi	% Disepakati Melalui Anggaran Baseline K/L	Total Usulan Kegiatan
Kep. Bangka Belitung	100%	5
Sumatera Utara	100%	6
Riau	98%	43
Bali	95%	43
Kalimantan Selatan	93%	67
Banten	92%	48
Papua Barat	90%	30
Lampung	87%	55
Sulawesi Barat	86%	125
Sumatera Selatan	86%	70

15

**Hasil Pembahasan (7)**

• **Usulan Disepakati Melalui Inisiatif Baru**

Untuk kegiatan yang dinilai prioritas dalam mendukung pencapaian sasaran nawa cita, belum masuk dalam e-planning Kemenkes, kebutuhan pendanaan terlalu besar untuk dipenuhi dari DAK, dan sudah memenuhi kriteria kesiapan untuk pelaksanaan di tahun 2016.

Provinsi	Jumlah Kegiatan	Nilai Usulan (Rp Juta)	Keterangan
Sulawesi Selatan	3	355.150,00	Pembangunan RS Tipe B, Sarpras Penanggulangan Penyakit Menular
Maluku	1	270.000,00	RS Pratama di 15 Pusat Gugus
Kalimantan Tengah	1	200.000,00	Pembangunan RSUD Doris
Bali	2	169.111,00	Rehab gedung dan alkes RS Kab. Gianyar
Sulawesi Tenggara	9	161.596,00	Alkes RS Jiwa dan RS Rujukan Provinsi, RS Pratama, Pembangunan Puskesmas, Rumah Dinas Dokter
Jawa Tengah	1	160.000,00	Alkes RSUD Bagas Waras
Papua Barat	3	153.500,00	RS Pratama di Manokwari Selatan, Maybrat, dan Tambrau
Kalimantan Timur	3	120.522,00	RSUD Kab. Berau, RS Pratama Mahakam Ulu, RS Pratama Kab. Berau
Nusa Tenggara Barat	5	78.182,00	RS Pratama, Alkes, Pengembangan Puskesmas
Kalimantan Barat	1	70.000,00	Pembangunan RSUD Kab. Kayong Utara
Lampung	1	50.000,00	Pembangunan RS Khusus Penanganan Narkoba
Sulawesi Barat	2	33.000,00	Rehab RSUD Majene, Sarana Sanitasi Desa
DI Yogyakarta	1	15.404,81	Alkes Posbindu
Sulawesi Utara	3	6.000,00	Penyediaan Air Bersih
Jawa Barat	1	750,00	Kendaraan Operasional Promosi Kesehatan
<b>TOTAL</b>		<b>1.843.215,81</b>	

16



**Hasil Pembahasan (8)**

## • Usulan Tambahan

Provinsi	Jumlah Kegiatan	Nilai Usulan (Rp Juta)	Keterangan
Aceh	1		Pengembangan 2 RS Regional (Tapak Tuan dan Langsa)
Sumatera Utara	12	234.733,00	Puskesmas rawat inap, yankes bergerak, PMT, MPASI, RS Regional, air bersih dan sanitas
Sumatera Barat	1		Penanganan rehabilitasi pengguna NAPZA
Jambi	1		Alkes Labkesda untuk deteksi narkoba
Bengkulu	2		Pengembangan RS M. Yunus, RSUD Kab. Muko-Muko
Lampung	1		Pengembangan RS Jiwa Lampung
Kep. Bangka Belitung	4		Pengembangan RS regional, pusling laut, sarpras RS Kab/Kota, Puskesmas rawat inap
Jawa Tengah	2	75.000,00	Pembangunan ruang rawat inap RS Moewardi Solo dan RSJ Amino Gondohutomo
Jawa Timur	2		Pemenuhan tenaga kesehatan dan Peningkatan kesehatan jiwa
Banten	1		Rehabilitasi RS Cilegon
Bali	3		Mobil unit HIV dan AIDS, Ambulans, Pembangunan RS Indra
Nusa Tenggara Barat	3	225.200,00	Pembangunan Bapelkes, Lab PTM, Sarpras Balai Kesehatan Mata


17


**Hasil Pembahasan (9)**

## • Usulan Tambahan

Provinsi	Jumlah Kegiatan	Nilai Usulan (Rp Juta)	Keterangan
Nusa Tenggara Timur	1		Pembanguna 5 RSUD (Nagekeo, Manggarai Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua)
Kalimantan Barat	1	20.000,00	Pembangunan jaringan perpipaan IPA 20 lpd Kecamatan Ngabang
Kalimantan Utara	1		Pembangunan RS Pratama Long Ampung, Alkes RS Pratama Krayan
Sulawesi Utara	3	123.000,00	Pengadaan alkes RS regional Kab. Minahasa Utara, IPA air minum RO, air bersih Kab. Bolaang Mongondow Utara
Sulawesi Tengah	1		Pembangunan baru RS bergerak
Sulawesi Selatan	5	370.917,00	Pembangunan RSUD Labuang Baji Makassar, SPAM Kabupaten
Gorontalo	5	13.194,00	Laboratorium, Alkes, Sistem Informasi, Rehab Puskesmas, Obat
Sulawesi Barat	1	7.000,00	Rehab RS Provinsi Sulbar
Maluku	1	2.100,00	Pengadaan Pusling Darat Kab Maluku Tenggara barat
Papua	4		Penguatan monev pengelolaan dana yang dialokasikan ke kabupaten/kota, Pengembangan pusat lisensi tanaman obat tradisional, Pembangunan RS Dok II Jayapura, RS Pratama Kobakma

18





**Hasil Pembahasan (10)** 

---

- **Beberapa Usulan Belum Ada Kesepakatan**
  - ✓ Usulan Kab/Kota yang belum diverifikasi provinsi sehingga tidak dapat diklarifikasi isi kegiatannya untuk dibahas
  - ✓ Usulan kegiatan untuk K/L lain yang belum ada *break-down* alokasinya per kab/kota (masih menunggu hasil Rakontek K/L terkait)

19



**Hasil Pembahasan (11)** 


---

- **Usulan Ditolak**


**Kegiatan yang tidak dapat dibiayai baik dari ABPN Pusat, Dekon, TP, maupun DAK sehingga diusulkan untuk dapat dibiayai dari APBD Provinsi atau Kabupaten/Kota.**

  - Tidak ada menu kegiatan pada Dekon, TP, maupun DAK  
*(peralatan sistem informasi dan internet, usulan pembangunan RS Paru, kegiatan operasi massal (bibir sumbing dan katarak), kemitraan asuransi kesehatan, cold chain, rehabilitasi pustu, pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin non PBI, kendaraan operasional, mobil jenazah, pemasangan alokon, alat fogging, pembangunan gedung theurapetic feeding centre)*
  - Kegiatan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari K/L (pusat)  
*(pengembangan poskesdes dan polindes (UKBM), labkesda, pengadaan sarana sanitasi sekolah, pendampingan pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin, sambungan rumah tangga untuk akses air bersih, pengembangan P2TP2A, pengadaan lahan untuk RS, pembangunan pagar puskesmas, pembangunan rumah pegawai bagi PNS, pengadaan PC untuk BPPKB)*
  - Usulan Penguatan RS yang belum siap persyaratannya untuk dilaksanakan tahun 2016  
(ketersediaan lahan, *master plan*, dan SDM kesehatan)
  - Duplikasi usulan kegiatan
  - Pembangunan gedung kantor (selain gedung untuk pelayanan)
  - Kegiatan yang belum diusulkan melalui *e-planning* Kemkes namun jumlah pendanaannya dinilai mampu untuk dialokasikan melalui APBD

20



## Permasalahan dalam Pembahasan



- K/L belum memiliki data alokasi per kab/kota, terkait dengan pagu indikatif dan Rakontek yang masih dalam proses
- Beberapa provinsi belum terlalu paham dengan pengisian usulan di aplikasi e-musrenbang sehingga banyak kegiatan yang diusulkan melalui catatan tambahan
- Beberapa provinsi belum melakukan verifikasi terhadap usulan yang disampaikan kab/kota dalam aplikasi e-musrenbang sehingga usulan tidak dapat dibahas
- Terdapat beberapa kegiatan yang diusulkan oleh daerah tidak sesuai pengelompokannya dengan indikator dan sasaran agenda nawacita yang terkait
- Selain itu, beberapa usulan kegiatan ditujukan kepada K/L penanggung jawab yang tidak sesuai tupoksinya
- Waktu pembahasan tidak cukup untuk membahas seluruh usulan daerah

21



## Kesimpulan dan Tindak Lanjut



- Sebagian besar usulan terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan KB.
- Kependudukan dan KB belum menjadi perhatian daerah yang ditunjukkan oleh sedikitnya Provinsi dan Kab/Kota yang mengangkat isu ini dan mengusulkan pembiayaannya untuk tahun 2016.
- Sebagian besar usulan disepakati untuk dialokasikan melalui dana Dekonsentrasi, TP dan DAK. Yang belum dapat diakomodasi, diusulkan sebagai inisiatif baru.
- Usulan kegiatan yang menjadi tugas dan kewenangan daerah disepakati untuk didanai melalui alokasi APBD.
- Beberapa usulan terkait dengan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan belum dilengkapi dengan data pendukung yang memadai (ToR dan RAB) termasuk *readiness criteria* (lahan, SDM, *master plan*).
- Ke depan, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif terkait pengusulan kegiatan melalui e-musrenbang, terutama kepada para pengambil keputusan di daerah.
- Bappeda Provinsi perlu melakukan verifikasi terhadap seluruh usulan utamanya dari kab/kota (prioritas dan kelayakan usulan).

22



**TERIMA KASIH**

23



**LAMPIRAN**

24

## Kelengkapan Dokumen Usulan

### • Inisiatif Baru

Provinsi	Usulan Kegiatan	Kebutuhan Pendanaan (Rp Juta)	Kelengkapan Dokumen Usulan
Lampung	Pembangunan RS Regional Khusus Penanganan Narkoba Untuk Wilayah Sumatera	50.000,00	-
Jawa Barat	Pengadaan Kendaraan Operasional Promosi Kesehatan	750,00	-
Jawa Tengah	Pengadaan alat - alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras	160.000,00	TOR dan RAB
DI Yogyakarta	Pengadaan Alat Kesehatan di Posbindu	15.404,81	-
Bali	Rehabilitasi Gedung Rumah Sakit, Kab. Gianyar	19.111,00	-
	Pengembangan Rumah Sakit, Kab. Gianyar	150.000,00	-
Nusa Tenggara Barat	Peningkatan Puskesmas menjadi Rumah Sakit Pratama Tipe D. , Kota Bima	50.000,00	-
	Pengadaan alat-alat kedokteran/kesehatan dan KB, Kota Bima	1.000,00	-
	Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas Non Perawatan, Kota Bima	1950,00	-
	Pengadaan alat-alat kedokteran/kesehatan dan KB, Kab. Sumbawa	17.582,00	-
	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu, Kab. Sumbawa Barat	9.600,00	-
Kalimantan Barat	Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah, Kab. Kayong Utara	70.000,00	TOR dan RAB
Kalimantan Tengah	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Rujukan (Pembangunan Gedung Pelayanan)	200.000,00	-
Kalimantan Timur	Pembangunan Rumah Sakit Kabupaten Berau	100.000,00	-
	Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Mahakam Ulu	10.000,00	-
	Pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan RS Pratama di Kab. Berau	10.522,00	-

25

## Kelengkapan Dokumen Usulan (2)

### • Inisiatif Baru

Provinsi	Usulan Kegiatan	Kebutuhan Pendanaan (Rp Juta)	Kelengkapan Dokumen Usulan
Sulawesi Utara	Penyediaan Air Bersih di Minahasa Kecamatan Kakas di Prov Sulawesi Utara	2.000,00	-
	Penyediaan Air Bersih di Prov Sulawesi Utara dg target 1,25 %	2.000,00	-
	Penyediaan Air Bersih di Prov Sulawesi Utara dg target 6,6%	2.000,00	-
Sulawesi Selatan	Pembangunan Rumah Sakit Type B plus	350.000,00	-
	Penanggulangan wabah yang terjadi di wilayah Kab. Sidenreng Rappang	150,00	-
	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	5.000,00	-
Sulawesi Tenggara	Peningkatan peralatan rumah sakit	5.000,00	-
	Peningkatan peralatan rumah sakit	43.000,00	-
	Pembangunan Baru RSUD Kab. Buton Tengah sebagai DOB	58.299,00	TOR dan RAB
	Pembangunan RSUD Tipe D Pratama Kabupaten Buton Selatan (DOB)	40.000,00	TOR dan RAB
	Pembangunan Baru Puskesmas Watorumbe Bata Kecamatan Mawasangka Tengah	935,00	-
	Pembangunan Baru Perumahan Dokter (DOB)	318,00	-
	Pembangunan Baru Rumah Kopel Paramedis (DOB)	898,00	-
	Rehabilitasi Total Puskesmas	3.825,00	-
	Pengadaan Alat-Alat di Puskesmas	9.321,00	-

26

**Kelengkapan Dokumen Usulan (3)**• **Inisiatif Baru**

Provinsi	Usulan Kegiatan	Kebutuhan Pendanaan (Rp Juta)	Kelengkapan Dokumen Usulan
Sulawesi Barat	Rehabilitasi Rumah Sakit Daerah Majene	30.000,00	
	Pembangunan MCK Plus 20 Desa	3.000,00	
Maluku	Peningkatan Puskesmas Rawat Inap menjadi RS Pratama di 15 Pusat Gugus	270.000,00	
Papua Barat	Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Kab. Manokwari Selatan	40.000,00	TOR dan RAB
	Pembangunan RSUD Pratama Maybrat	100.000,00	TOR dan RAB
	Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Fef	13.500,00	
<b>TOTAL USULAN</b>		<b>1.843.215,81</b>	

27

**Kelengkapan Dokumen Usulan (4)**• **Usulan Tambahan**

Provinsi	Jumlah Kegiatan	Nilai Usulan (Rp Juta)	Keterangan	Kelengkapan Dokumen Usulan
Aceh	1		Pengembangan 2 RS Regional (Tapak Tuan dan Langsa)	-
Sumatera Utara	12	234.733,00	Puskesmas rawat inap, yankes bergerak, PMT, MPASI, RS Regional, air bersih dan sanitas	-
Sumatera Barat	1		Penanganan rehabilitasi pengguna NAPZA	-
Jambi	1		Alkes Labkesda untuk deteksi narkoba	-
Bengkulu	2		Pengembangan RS M. Yunus, RSUD Kab. Muko-Muko	-
Lampung	1		Pengembangan RS Jiwa Lampung	-
Kep. Bangka Belitung	4		Pengembangan RS regional, pusling laut, sarpras RS Kab/Kota, Puskesmas rawat inap	-
Jawa Tengah	2	75.000,00	Pembangunan ruang rawat inap RS Moewardi Solo dan RSJ Amino Gondohutomo	-
Jawa Timur	2		Pemenuhan tenaga kesehatan dan Peningkatan kesehatan jiwa	-
Banten	1		Rehabilitasi RS Cilegon	-
Bali	3		Mobil unit HIV dan AIDS, Ambulans, Pembangunan RS Indra	-
Nusa Tenggara Barat	3	225.200,00	Pembangunan Bapelkes, Lab PTM, Sarpras Balai Kesehatan Mata	-

28

**Kelengkapan Dokumen Usulan (5)**

## • Usulan Tambahan

Provinsi	Jumlah Kegiatan	Nilai Usulan (Rp Juta)	Keterangan	Kelengkapan Dokumen Usulan
Nusa Tenggara Timur	1		Pembanguna 5 RSUD (Nagekeo, Manggarai Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua)	-
Kalimantan Barat	1	20.000,00	Pembangunan jaringan perpipaan IPA 20 lpd Kecamatan Ngabang	-
Kalimantan Utara	1		Pembangunan RS Pratama Long Ampung, Alkes RS Pratama Krayan	-
Sulawesi Utara	3	123.000,00	Pengadaan alkes RS regional Kab. Minahasa Utara, IPA air minum RO, air bersih Kab. Bolaang Mongondow Utara	TOR dan RAB (RS regional Kab. Minahasa Utara)
Sulawesi Tengah	1		Pembangunan baru RS bergerak	-
Sulawesi Selatan	5	370.917,00	Pembangunan RSUD Labuang Baji Makassar, SPAM Kabupaten	TOR dan RAB (RSUD Labuang Baji )
Gorontalo	5	13.194,00	Laboratorium, Alkes, Sistem Informasi, Rehab Puskesmas, Obat	-
Sulawesi Barat	1	7.000,00	Rehab RS Provinsi Sulbar	-
Maluku	1	2.100,00	Pengadaan Pusling Darat Kab Maluku Tenggara barat	TOR dan RAB
Papua	4		Penguatan monev pengelolaan dana yang dialokasikan ke kabupaten/kota, Pengembangan pusat lisensi tanaman obat tradisional, Pembangunan RS Dok II Jayapura, RS Pratama Kobakma	TOR dan RAB (Penguatan Monev, RS Pratama Kobakma)

29



## Rekap Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mengusulkan dan tidak mengusulkan KB



- **Provinsi yang tidak mengajukan usulan terkait KB sebanyak 14 provinsi**, yaitu: Jambi, Sumut, DIY, DKI, Kepri, Babel, Riau, Kalteng, Kaltara, Kalsel, Sulbar, Gorontalo, Papua, dan Malut.
- **Kab/kota yang mengajukan usulan DAK KB sebanyak 45 Kab/Kota**, dengan rincian sbb: (Sumbar: 1 Kab/kota, yaitu kab Agam; Aceh: 2Kab/kota, yaitu aceh jaya dan langsa; Jatim: 10 Kab/kota, yaitu lumajang, blitar, pacitan, bojonegoro, magetan, tulung agung, lamongan, gresik, mojosari, jombang; Jabar: 2Kab/kota, yaitu sukabumi dan bandung; Lampung: 2Kab/kota, yaitu Way Kanan dan Mesuji; Sumsel: 2Kab/kota, yaitu Prabumulih dan Lubuk Linggau; Kalbar: 1Kab/kota, yaitu Sambas; NTT: 6Kab/kota, yaitu Flores Timur, ngada, Timor Tengah Selatan, Manggarai Barat, Sumba Timur, alor; NTB: 1Kab/kota, yaitu sumbawa; Bali: 1Kab/kota, yaitu karangasem; Jateng: 2Kab/kota, yaitu pekalongan dan sukoharjo; Banten: 1 Kab/kota, yaitu tangsel; Sulsel: 5 Kab/kota, yaitu pare-pare, pangkajene kelp, jeneponto, pinrang, bulukumba; Sulut: 1Kab/kota, yaitu Minahasa tenggara; Papua: 4 kab/kota, yaitu keerom, nabire, merauke, tolikara; Maluku: 1 kab/kota yaitu kota Tual; Sultra: 3 kab/kota yaitu wakatobi, buton, muna)
- **Provinsi yang mengajukan usulan pengadaan alokon yang diakomodasi oleh pusat (UU 23/2014) sebanyak 9 Provinsi** yang terdiri dari provinsi Bengkulu, Sumsel, Kaltim, NTB, Bali, Sulsel, Sulteng, papua, dan Sultra.
- **Provinsi yang mengajukan usulan kegiatan KB lainnya yang diakomodasi oleh perwakilan bkbn provinsi (belanja apbn pusat) sebanyak 9 Provinsi** yang terdiri dari provinsi Bengkulu, Aceh, Jatim, Sumsel, NTT, NTB, Bali, Jateng, dan papua.

30